



SALINAN

**BUPATI MUNA BARAT
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

KEPUTUSAN BUPATI MUNA BARAT
NOMOR: 100.3.3.2/ 3 /2026

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH TAHUN 2026

BUPATI MUNA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa bahwa peraturan kepala daerah dibentuk dalam rangka pelaksanaan peraturan daerah atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangannya;
- b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum atas pembentukan produk hukum daerah diperlukan perencanaan penyusunan pembentukan peraturan kepala daerah;
- c. bahwa perencanaan penyusunan peraturan kepala daerah diwujudkan dalam program pembentukan peraturan kepala daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2026, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan rancangan Peraturan Kepala Daerah;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Laworo
pada tanggal 2 Januari 2026

BUPATI MUNA BARAT,

ttd

LA ODE DARWIN



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MUNA BARAT

NOMOR : 100.3.3.2/ 3 /2026

TANGGAL : 2 Januari 2026

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH TAHUN 2026

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH
TAHUN 2026

NO	JUDUL	OPD PEMRAKARSA
1.	TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ADD PADA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2026	DPMD
2.	PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT NOMOR 14 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT.	POL PP
3.	PEMBENTUKAN SATGAS LINMAS KABUPATEN DAN KECAMATAN	POL PP
4.	TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS PELANGGARAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT NOMOR 14 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT.	POL PP
5.	PEDOMAN PENERAPAN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI	DINAS PEPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
6.	NILAI PEROLEHAN AIR TANAH SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAR AIR TANAH	BAPENDA
7.	PEDOMAN PENGELOLAAN PENGADUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH	KOMINFO
8.	STANDAR SATUAN HARGA TAHUN 2027	BKAD
9.	PERTANGGUNGJAWABAN APBD TAHUN 2025	BKAD
10.	PEDOMAN APBD TAHUN 2027	BKAD
11.	RETRIBUSI DAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PETERNAKAN	PETERNAKAN
12.	KEMITRAAN USAHA PETERNAKAN ANTARA PETERNAK DAN PIHAK LAIN	PETERNAKAN
13.	PENGENDALIAN LALU LINTAS TERNAK DAN PRODUKSI TERNAK	PETERNAKAN
14.	SISTEM PEMBIBITAN DAN DISTRUKSI BIBIT TERNAK DAERAH	PETERNAKAN
15.	PENGEMBANGAN KAWASAN TERPADU	PETERNAKAN
16.	PENANGGULANGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR STRATEGIS (PHMS)	PETERNAKAN
17.	STANDAR PELAYANAN KESEHATAN HEWAN DAN PUKSESMA	PETERNAKAN
18.	UPTD PETERNAKAN	PETERNAKAN
19.	SATU DATA INDONESIA	KOMINFO
20.	PEDOMAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DAERAH	KOMINFO
21.	TANDA TANGAN ELEKTRONIK	KOMINFO

22.	SP4N LAPOR	KOMINFO
23.	KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH	SETDA
24.	PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN KELOMPOK RENTAN	SEKRETARIAT DAERAH
25.	ALOKADI DANA DESA	DPMD
26.	DANA DESA	DPMD

BUPATI MUNA BARAT,

ttd

LA ODE DARWIN

